

DAMPAK PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA CANGA'AN KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

Rully Khoiruddin

Pendidikan Non Formal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya
(Roulee23@gmail.com)

Heryanto Susilo M.Pd

Pendidikan Non Formal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya

Abstrak: Salah satu bentuk kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). yang merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat guna mengurangi jumlah kemiskinan melalui pemberian dana bergulir untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui kaum perempuan sebagai bagian yang juga bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga di pedesaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, subjek penelitian ini anggota dan ketua kelompok SPP serta pihak UPK. Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi partisipatif dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, subjek penelitian ini anggota dan ketua kelompok SPP serta pihak UPK. Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi partisipatif dan dokumentasi. Temuan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan SPP yang sesuai dengan petunjuk teknis operasional, anggota SPP mampu mengelola dana pinjaman dengan baik, adanya peningkatan pendapatan keluarga, adanya perkembangan terhadap usaha yang dijalankan, serta mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari usaha yang mendapat dana dari program SPP. Faktor pendukung dalam program ini adalah faktor internal yaitu motivasi dukungan keluarga, serta faktor eksternal yaitu persyaratan yang mudah, bunga yang ringan, adanya IPTW, tanpa jaminan serta jangka waktu pengembalian ditentukan oleh kelompok. sementara faktor penghambat yang dapat menghambat pencapaian dari tujuan program antara lain faktor internal yaitu tingkat pendidikan yang rendah, dan faktor eksternal yaitu sistem jaminan tanggung renteng, evaluasi yang tidak terstruktur, serta kurangnya proses pendampingan

Kata Kunci: PNPM-MP, Simpan pinjam perempuan, Kesejahteraan keluarga

Abstract: One of the activities with in the National Program for Community Empowerment is the Rural (PNPM-MP) Woman's Savings and Loan Programs (SPP), which is one of the community development program to reduce poverty with woman as a part who are also responsible for the family's economy in the rural areas. In this research, the author uses qualitative method. Subject of this research including members and chairman of the SPP and the UPK. In collecting data, the author uses interviews, participatory observation and documentation. The results of this research are the process SPP according to operational technical road map, SPP members are able to manage the loan well, an increase in family income, a development in the running business, and ability to fulfill the daily needs from the businesses that has received funding from SPP program. Supporting factor in programs it is internal factor which is motivation, family support, and external factor which is stipulating which is easily, demulcent flower, mark sense IPTW, on trust and return duration determined by group. While resistor factor that can constrain attainment of to the effect program for example internal factor which is low education level, and external factor which is surety system tanggung renteng, unstructured evaluation, and associate that insufficiently.

Keywords; PNPM-MP, Woman Savings and Loans, Family Welfare

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi di setiap negara baik negara maju maupun negara berkembang. Kemiskinan penduduk merupakan kondisi sosio-ekonomi yang menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan penduduk tidak terpenuhi. Angka kemiskinan di negara berkembang lebih banyak di bandingkan dengan negara maju, tidak terkecuali di Indonesia. Masalah kemiskinan di negara Indonesia memang sudah ada sejak jaman dahulu kala bahkan sebelum negara kita merdeka. selain itu kemiskinan merupakan suatu masalah

kesejahteraan yang di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: tingkat pendidikan, pengangguran kesehatan dll. Kemiskinan juga akan membawa dampak negatif dalam kehidupan masyarakat seperti timbulnya masalah-masalah sosial yang juga akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pada suatu negara, karena tolak ukur kesuksesan pertumbuhan perekonomian pada suatu negara juga dilihat dari tinggi atau rendahnya angka kemiskinan.

Survei badan pusat statistik (BPS) pada bulan Maret 2014 angka kemiskinan di negara Indonesia

mencapai 11,25 persen dari jumlah penduduk atau jika dijumlahkan angka kemiskinan tersebut mencapai 28,28 juta penduduk. Dari data tersebut jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak yaitu mencapai angka 17,77 juta jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin di daerah perkotaan yang mencapai 10,51 juta orang, di Kabupaten Bojonegoro sendiri angka kemiskinan pada tahun 2012 mencapai angka 251.253 jiwa atau 16,6 persen dari jumlah penduduk di kabupaten tersebut. (Bojonegorokab.bps.go.id diakses pada 14 februari 2015 pukul 15.00 wib)

Data tersebut membuktikan bahwa kemiskinan di daerah pedesaan lebih banyak dari pada kemiskinan di daerah perkotaan. Hal ini dikarenakan kurang meratanya pembangunan antara di daerah pedesaan dengan pembangunan di daerah perkotaan, di daerah perkotaan pembangunan cenderung lebih cepat dan merata dari pada di daerah pedesaan yang cenderung lebih lama dan mengalami perlambatan.

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda perserikatan bangsa-bangsa yang telah dituangkan dalam millenium development goals (MDG'S) 1990-2015.

Selain pada 8 agenda besar pembangunan oleh PBB diatas, dalam pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa ada dua tujuan kemerdekaan yang paralel yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu tujuan dari berbangsa dan bernegara adalah mewujudkan suatu kesejahteraan bagi semua warga negaranya, upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga negara, baik secara individual maupun secara kelompok. Kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional di kemukakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jalur pendidikan nasional terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal. Yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berjenjang dan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan atas. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan terutama di daerah pedesaan diwujudkan dalam pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Salah satu prinsip pendekatan non formal dalam pembangunan masyarakat adalah pendekatan berkelanjutan. Salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat (*people centered development*).

Pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan untuk menangani masalah-masalah yang ada dalam masyarakat terutama masalah perekonomian. Pentingnya

pembangunan masyarakat yang menitikberatkan sektor ekonomi bertujuan agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pertumbuhan di sektor ini, tanpa mengabaikan peranan sektor-sektor lainnya dan sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan penduduk. Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak di upayakan melalui pembangunan sektoral maupun regional.

Mulai tahun 2007 pemerintah indonesia mencanangkan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri yang terdiri atas PNPM mandiri perdesaan dan PNPM mandiri perkotaan, serta PNPM mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM-MP adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan juga berkesinambungan. Komponen terbesar dari program ini adalah pemberdayaan masyarakat pedesaan, mengikuti format sebelumnya yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PNPM mandiri mendorong partisipasi warga dalam setiap tahapan program.

Lingkup kegiatan PNPM mandiri pedesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas/ kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Permasalahan perempuan sampai saat ini masih menjadi suatu persoalan yang masih dihadapi oleh negara-negara berkembang, tidak terkecuali di indonesia. Diantaranya adalah rendahnya sumber daya perempuan, tingginya angka kekerasan pada perempuan dll. Semuanya menuntut adanya suatu perhatian dan perjuangan yang serius oleh semua stakeholder yang ada terutama kelompok perempuan sendiri. Seperti yang kita ketahui perempuan merupakan aset berharga dalam proses pembangunan bangsa, dengan kata lain keberhasilan pembangunan bangsa juga di tentukan oleh kualitas kaum perempuan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah perempuan adalah melalui pemberdayaan perempuan.

Merujuk pada poin ke empat yaitu penambahan permodalan simpan pinjam perempuan untuk kelompok perempuan yang merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program SPP merupakan salah satu upaya pemberdayaan perempuan dalam bidang perekonomian .

Tujuan umum dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di pedesaan, kemudahan akses usaha skala mikro. Pemenuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin serta penciptaan lapangan kerja. SPP sebagai usaha simpan pinjam merupakan suatu program yang diharapkan mampu memecahkan persoalan di tingkat masyarakat, yang pengelolaanya diserahkan pada perempuan sebagai bagian yang juga bertanggung jawab pada perekonomian

keluarga di perdesaan, program ini membuka jalan bagi kelompok perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan, dimana mereka dapat meminjam uang setiap saat dengan prosedur yang gampang, bunga yang murah, dan keuntunganpun akan kembali ke mereka. Pinjaman dapat di gunakan untuk mengembangkan usaha, biaya sekolah anak, ataupun untuk kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Setiap kelompok SPP mendapatkan jumlah pinjaman yang berbeda-beda tergantung pada jumlah anggota yang ada, seberapa lama kelompok tersebut melaksanakan program SPP. Dengan demikian, dengan adanya program simpan pinjam perempuan di harapkan adanya perubahan kondisi di dalam masyarakat, khususnya anggota kelompok itu sendiri, dimana dengan adanya pengelolaan yang baik terhadap dana simpan pinjam perempuan di dalam kelompok, di harapkan program simpan pinjam perempuan ini dapat menjadi alat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Bagi masyarakat Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro program SPP tidak asing bagi mereka, program ini mulai ada pada tahun 2005. Sampai saat ini memiliki anggota sekitar 10 orang. Program SPP di desa ini di jalankan oleh kelompok jama'ah tahlil Ar-Rosyidah.

Program SPP di desa ini memiliki tingkat pengembalian pinjaman yang hampir mencapai seratus persen. Serta terus bertambahnya nilai pinjaman sari tahun ke tahun dari UPK setempat. Selain itu dengan bunga pinjaman yang lebih rendah dari pinjaman bank menjadi salah satu faktor yang membuat warga atau masyarakat yang sangat antusias dengan adanya program SPP ini.

Seiring dengan berjalannya program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Canga'an ini telah menghadirkan perubahan terhadap kehidupan keluarga anggota kelompok SPP tersebut, Namun belum dapat dilihat sejauh mana kegiatan SPP berdampak pada kesejahteraan keluarga. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "*Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*"

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
- 2) Bagaimana dampak program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
- 3) Apa faktor pendukung pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
- 4) Apa faktor penghambat pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP di

Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikaitkan, secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisis program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Mendeskripsikan dan menganalisis dampak program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
- 3) Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
- 4) Mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Hasil penelitian ini tentunya mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, manfaat tersebut antara lain:

- 1) Secara teoritis, untuk menambah jumlah penelitian dalam jurusan pendidikan non formal sehingga diharapkan mampu menambah pengetahuan dan keilmuan dalam jurusan pendidikan non formal.
- 2) Secara praktis. Penelitian ini di harapkan akan memberikan gambaran dan pemahaman program PNPM-MP terlebih pada program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga, sehingga diharapkan mampu menjadi referensi dan juga masukan dalam evaluasi dan pengembangan serta perbaikan program PNPM-MP lebih khususnya pada program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Untuk memperjelas penelitian suatu penelitian perlu adanya definisi operasional, adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Definisi Operasional
 - a) Pelaksanaan program PNPM-MP program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
Suatu proses pelaksanaan program SPP yang terdiri atas pengajuan proposal, verifikasi kelompok, musyawarah pendanaan perguliran, pencairan dana, pemanfaatan dana, pembayaran angsuran dan evaluasi.
 - b) Dampak Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP Terhadap Kesejahteraan Keluarga..
Dampak adalah hal-hal yang dirasakan dan dilihat nyata oleh peneliti setelah ikut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dampak yang di maksud disini adalah dampak terhadap kesejahteraan keluarga. indikator kesejahteraan yang dimaksud adalah:
 - a. Mampu mengelola dana pinjaman
 - b. Mampu meningkatkan pendapatan keluarga
 - c. Mampu mengembangkan usaha
 - d. Mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- c) Faktor pendukung pelaksanaan PNPM-MP program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang dirasa dapat memperlancar jalannya program SPP. faktor pendukung ini dapat berasal dari dalam dan luar diri pelaku dalam program SPP.

- d) Faktor penghambat pelaksanaan program PNPM-MP program Simpan Pinjam Perempuan

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang dirasa dapat menghambat jalannya program SPP PNPM-MP. Faktor penghambat ini dapat berasal dari dalam dan luar diri pelaku dalam program SPP.

- 2) Keterbatasan Penelitian

a) Penelitian ini hanya dilakukan pada kelompok simpan-pinjam perempuan Ar-Rosyidah di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Karena kelompok SPP Ar-Rosyidah adalah kelompok SPP yang pertama di Desa Canga'an dan setiap tahun jumlah pinjaman selalu mengalami kenaikan.

b) Penelitian hanya dilakukan untuk meneliti pelaksanaan, dampak, faktor pendukung dan faktor penghambat program SPP pada tahun 2014-2015.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangun partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat di tumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering diduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, masa PNPM mandiri akan di laksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan millenium atau *Millenium Development Goals (MDGs)*. Pelaksanaan PNPM mandiri yang berdasar pada indikator-indikator

keberhasilan yang terukur akan membantu indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut.

Pendidikan non formal sangat dekat dengan persoalan-persoalan pembangunan masyarakat sebagai bagian penting dari pembangunan lokal atau *local development* pada level komunitas, yang berdampak langsung pada pengembangan masyarakat melalui pendidikan. Selain itu timbulnya berbagai permasalahan yang timbul pada masyarakat pedesaan, melandasi kehadiran dan perkembangan subsistem pendidikan non formal untuk berperan dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam pembangunan masyarakat.

Sementara itu, konsep pembangunan masyarakat (Sudjana 2004:267) merupakan upaya terencana dan sistematis yang dilakukan oleh, untuk dan dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya pada suatu kesatuan wilayah. Salah satu tujuan dalam pembangunan masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas kahidupan masyarakat.

Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. (petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri pedesaan tahun 2009).

Dalam rangka pemberdayaan perempuan, pengembangan lembaga keuangan mikro dengan strategi ini telah membuka jalan bagi kelompok perempuan miskin untuk meningkatkan kesejahteraan, dimana mereka dapat meminjam uang setiap saat dengan prosedur yang gampang, bunga yang murah, dan keuntunganpun akan kembali untuk mereka. Pinjaman dapat dipergunakan untuk mengembangkan usaha dan juga kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Dengan demikian, dengan adanya program simpan pinjam perempuan ini di harapkan program simpan pinjam perempuan ini diharapkan adanya perubahan kondisi di dalam masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran sehingga masyarakat bisa merasakan kemakmuran hidup dengan adanya program ini.

Menurut Sawidak dalam Sunarti (2006:2-11) kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang di peroleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.

Rambe dalam Sunarti (2006:2-13) mendefinisikan kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha penemuan kebutuhan jasmani, rohani dan sosia yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tanga serta masyarakat.

Menurut Soetjipto (1992) kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis

dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami ambatan-hambatan yang serius didalam lingkungan keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk diatasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standart kehidupan keluarga akan terwujud.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu tatanan kehidupan yang penuh dengan rasa kepuasan, ketentraman melalui berbagai usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.

Menurut Rozalinda (dalam Sujarwati 2013:16) perempuan memberikan kontribusi secara ekonomi bagi keluarga manakala penghasilan suami tidak mencukupi atau bahkan bila suami tidak bekerja..

Indikator kesejahteraan keluarga oleh perempuan yang akan dijabarkan adalah sebagai berikut:

- 1) Mampu mengelola dana pinjaman
Mampu mengelola dana pinjaman yang dimaksud disini adalah perempuan yang memperoleh dana pinjaman dari SPP mampu menggunakan dengan baik dana tersebut, mampu menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan program SPP.
- 2) Mampu meningkatkan pendapatan keluarga.
Mampu meningkatkan pendapatan keluarga artinya bertambahnya jumlah pemasukan atau pendapatan dalam keluarga yang berasal dari usaha yang mendapat pinjaman dari program SPP.
- 3) Mampu mengembangkan usaha
Mampu mengembangkan usaha artinya unit yang dijalankan oleh anggota kelompok SPP mampu dikembangkan lebih maju lagi setelah mendapat pinjaman dari program SPP.
- 4) Mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari artinya unit usaha yang dijalankan oleh anggota kelompok SPP dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga anggota tersebut, selain juga penghasilan dari suami.

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut azwar (2007:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif, banyak penelitian kualitatif yang merupakan penelitian sampel kecil.

Pelaksanaan penelitian ini di lakukan di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu tempat pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) simpan pinjam perempuan, Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang diperlukan:

- 1) Sumber data primer.

sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengelola kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ar-Rosyidah, yaitu ketua dan anggota kelompok SPP Ar-Rosyidah yang berjumlah 10 orang.

- 2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa arsip seperti dokumen-dokumen, daftar penduduk ataupun sumber data lain yang relevan berasal dari UPK kecamatan,. Maupun dari masyarakat yang mengetahui program SPP seperti kepala desa, kepala dusun, ataupun masyarakat yang lainnya. Jika dihitng dari keseluruhan sumber data, ada 20 sumber data baik sumber data primer atau sumber data sekunder.

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Wawancara
- 2) Observasi
- 3) Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif untuk mengetahui dan mengikuti data dan fakta tentang dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Canga'an Kecamatan Kanor kabupaten Bojonegoro. Adapun langkah-langkah yang harus di tempuh dalam analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (dalam Riyanto: 2007:31) adalah

- 1) Reduksi data

Dalam proses ini peneliti mencari makna dari setiap data yang di peroleh dari berbagai sumber dengan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian peneliti membuat sebuah rangkuman yang menggambarkan tentang proses dan pertanyaan-pertanyaan pada setiap komponen penelitian. Komponen-komponen yang dimaksud disini adalah suatu pemahaman responden mengenai pelaksanaan SPP dan dampak program tersebut. Dalam penelitian ini display data di lakukan peneliti dengan membuat suatu narasi yang berisi tentang hasil-hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, serta di sertakan pula tabel-tabel atau grafik untuk mendukung hasil penelitian tentang pelaksanaan, dampak program SPP serta faktor pendukung dan penghambat program tersebut.

- 2) Verifikasi data

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan semua data yang dikumpulkan dari para informan baik dari ketua kelompok SPP, anggota kelompok SPP, kepala desa dan kepala UPK. Yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk di paparkan dan di tarik kesimpulan.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kredibilitas

Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data terhadap penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan.

- a) Prolonged Engagement
 - b) Triangulasi
 - c) Peer debriefing
 - d) Member check
 - e) Persistent observation.
- 2) Transferability

Dalam kriteria ini peneliti menggambarkan keadaan geografi, penduduk dan kondisi masyarakat di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Menganalisis perubahan kondisi keluarga sebelum dan sesudah program SPP, mata pencaharian anggota kelompok SPP, serta faktor yang mendukung dan menghambat program SPP.

- 3) Dependability

Dalam penelitian ini peneliti melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, dalam proses audit tersebut peneliti juga sering melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, untuk ingin melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses penelitian, disini peneliti sering melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing Bapak Heryanto susilo M.Pd.

- 4) Konfirmability

Dalam proses ini peneliti melakukan pengujian dengan mengaitkan antara hasil penelitian dengan proses penelitian untuk mendapat data yang sesuai dan akurat. Jika ditemukan adanya kesesuaian antara hasil dan proses penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut akurat tetapi jika tidak adanya kesesuaian antara hasil dengan proses penelitian maka dapat dikatakan penelitian kurang akurat. Konfirmability dalam penelitian ini dilakukan oleh dosen penguji skripsi Bapak. Prof. Dr. Yatim Riyanto M.Pd dan Ibu Sjafiatul Mardiyah S.Sos M.Pd. Serta dosen pembimbing skripsi Bapak Heryanto Susilo M.Pd.

PEMBAHASAN

Setelah peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti kemudian melakukan pengolahan data, dalam hal ini mendeskripsikan mengenai pelaksanaan, faktor pendukung, faktor penghambat serta dampak program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM-MP) program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu program yang disusun oleh pemerintah, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat.

Program Simpan Pinjam Perempuan merupakan salah satu bentuk program PNPM mandiri yang mengfokuskan pada pemberdayaan perempuan melalui pemberian dana bergulir dan kredit mikro guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Edi Suharto (2014:169) bahwa pembangunan nasional memandang penting keluarga sebagai unit analisis maupun fokus pemberdayaan. Tidak sedikit departemen atau kementerian yang mengfokuskan perhatiannya pada pemberdayaan keluarga, keluarga memiliki makna yang sentral dalam sebuah realitas sosial. Banyaknya pihak yang memperhatikan keluarga sebagai tema pemberdayaan, sebenarnya merupakan hal positif jika di barengi adanya koordinasi lintas profesional dan sektoral. Salah satu bentuk pemberdayaan keluarga adalah melalui program SPP ini, dalam program ini pemberdayaan keluarga difokuskan pada peningkatan peran perempuan dalam keluarga. Dengan pemberian kredit mikro pada kelompok perempuan.

Payne (dalam Suhanadji dan Susilo 2015:153) mengemukakan bahwa tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik, ekonomi dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar, program SPP ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan guna mencapai persamaan ekonomi dan sosial, melalui upaya dengan saling membantu antar sektor yang terlibat, dengan mengembangkan langkah-langkah kecil dengan pemberian kredit mikro kepada kelompok perempuan.

- 1) Pelaksanaan PNPM-MP Program Simpan Pinjam Perempuan Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu program yang diluncurkan untuk mewujudkan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Program-program yang ada dalam PNPM-MP dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Sesuai dengan visi dan misi PNPM-MP itu sendiri.

Salah satu prinsip dalam PNPM-MP adalah kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu program untuk memberdayakan kaum perempuan dengan memberikan dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Menurut Gumelar (2011) jumlah populasi perempuan yang hampir sama dengan laki-laki sangat potensial dalam membangun ketahanan ekonomi. Sesuai dengan pendapat tersebut

Program Simpan Pinjam Perempuan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan perekonomian dengan mengoptimalkan peran perempuan, melalui program ini perempuan akan ikut berperan serta dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

Program ini memberikan permodalan usaha melalui dana bergulir dan kredit mikro, agar perempuan dapat menjalankan usaha yang mereka jalankan. Dan dari usaha tersebut perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Menurut Sudjana (2004:52) manajemen pendidikan non formal terdiri atas: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian dan pengembangan. Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang.

Perencanaan program SPP diawali dengan pengajuan proposal, pengajuan proposal, dalam pengajuan proposal ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh anggota, persyaratan tersebut diantaranya adalah adanya usaha yang dijalankan oleh anggota kelompok, adanya kepengurusan yang jelas, adanya pertemuan rutin dan didukung oleh pertemuan kelompok.

Salah satu tujuan program SPP adalah mempercepat proses pemenuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, untuk mewujudkan hal tersebut tentunya setiap anggota harus memiliki usaha, bentuk dari usaha yang dijalankan oleh setiap anggota kelompok berbeda-beda, ada yang usaha menjual pakaian dengan cara kredit, cathering, menjual pakaian dll.

Selain memiliki usaha para anggota juga harus memiliki pertemuan kurang lebih satu tahun. Hal ini tentunya sesuai dengan ketentuan dalam program SPP yaitu terlembagaan, dalam hal ini kelompok Ar-rosyidah merupakan kelompok yang berawal dari kelompok jama'ah tahlil. Pertemuan mereka berupa tahlil dan istighotsah yang dijalankan setiap dua minggu sekali. dalam pertemuan tersebut yang hadir tidak hanya dari anggota kelompok SPP Ar-rosyidah, tetapi juga orang yang tergabung dalam kelompok jama'ah tahlil Ar-rosyidah, dalam pertemuan ini juga dijadikan tempat silaturahmi antar anggota SPP.

Sistem administrasi juga harus ada jika ingin melakukan pinjaman di program SPP ini, sistem administrasi yang ada dalam kelompok Ar-rosyidah ini meliputi buku kas, buku angsuran dan buku tabungan, administrasi ini sudah sesuai dengan ketentuan administrasi yang ada pada program SPP, dalam sistem administrasi ini kelemahan terjadi pada pengelolaan, dalam pengeolaan hanya dilakukan oleh ketua kelompok SPP saja, bendahara dan sekretaris nampak belum terlihat dalam pengeolaan administrasi ini. Pengelolaan administrasi tersebut sesuai dengan pengelolaan dokumen dan aministrasi yang ada pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

Musyawaharah kelompok akan dilakukan jika persyaratan diatas sudah terpenuhi, musyawarah kelompok ini akan membahas berapa dana yang akan diajukan pada tahun 2014, pada musyawarah tersebut dihadiri oleh seluruh anggota SPP. dalam musyawarah tersebut akan disepakati berapa besar

pinjaman yang akan diajukan, dalam musyawarah kelompok tersebut kelompok SPP Ar-rosyidah sepakat untuk mengajukan pinjaman Rp.85.000.000.

Setelah sepakat untuk mengajukan dana dengan jumlah tersebut, ketua kelompok akan mengajukan proposal, dalam pengajuan proposal ini proposal di siapkan oleh pihak UPK, proposal dapat diambil di kantor UPK, dalam proposal tersebut akan tercantum berapa dana yang akan diajukan, dalam proposal tersebut terdapat setelah mendapatkan persetujuan dari kepala desa. Persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk tanda tangan yang harus ada dalam proposal tersebut. Setelah proposal selesai akan diantarkan ke kantor UPK.

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk membentuk organisasi, dalam pengorganisasian ini sudah terbentuk ketua, bendahara, sekretaria serta anggota. Dalam sistem pengorganisasian ini terdapat beberapa kelemahan, salah satunya beban tugas hanya di bebankan ke ketua kelompok SPP saja. Sehingga tugas sekretaris dan bendahara hanya sebagai formalitas saja.

Penggerakan adalah upaya pemimpin untuk memberikan dorongan kepada pihak yang dipimpin atau pelaksana kegiatan supaa pihak yang dipimpin mengarahkan kegiatannya, dengan menggunakan potensi yang ada dalam dirinya, untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Penggerakan dalam SPP ini diawali dengan musyawarah pembahasan awal oleh pihak UPK, dalam proses ini akan dibahas tentang proposal yang telah masuk. Sesuai dengan ketentuan, akan ada tahapan verifikasi setelah proposal masuk, tim verifikasi adalah tim dari UPK, proses verifikasi dilakukan untuk mengetahui kevalidan data yang ada, hasil dari pembahasan awal akan dituangkan dalam proses verifikasi, untuk mengetahui kesesuaian antara data yang ada dalam proposal dengan data yang didapat dilapangan. Selain itu tahapan verifikasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerima dana sesuai dengan ketentuan yaitu diutamakan kelompok yang memiliki anggota kelompok rumah tangga miskin.

Proses verifikasi ini dilakukan oleh tim verifikasi dari UPK, yang berjumlah 4 orang, selain dari tim verifikasi juga ada perwakilan dari desa. Dalam proses verifikasi ini anggota akan ditanya apa bentuk usaha mereka, berapa anak yang masih sekolah, dll. Dalam proses verifikasi ini tim akan melihat mana kelompok yang layak dan mana kelompok yang belum layak.

Terdapat kelemahan dalam verifikasi ini yaitu verifikasi hanya dilakukan dibalai desa, tidak langsung kelapangan, sehingga terkadang data yang ada belum sesuai dengan kenyataan yang ada. Kelemahan ini terlihat manakala ada seorang anggota yang tidak memiliki usaha tetapi mendapatkan dana pinjaman. Hal ini nampaknya belum sesuai dengan proses verifikasi yang ada pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

Hasil dari proses verifikasi akan dibahas dalam musyawarah pembahasan akhir yang diadakan oleh UPK, dalam musyawarah ini diadakan di kantor UPK, dalam proses ini data yang didapat dalam verifikasi akan dibahas termasuk pengajuan dan rekomendasi dari tim verifikasi. Dalam proses ini akan diketahui kelompok mana yang layak dan kelompok mana yang belum layak.

Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara atau membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau membawa keadaan yang seharusnya terlaksana, pembinaan dalam SPP ini melalui Musyawarah Pendanaan Pergiliran (MPP).

Hasil dari musyawarah akhir akan dibahas dalam musyawarah pendanaan pengiliran, musyawarah ini dihadiri oleh seluruh anggota, ketua kelompok SPP dan tim dari UPK. Dari sinilah kita bisa mengetahui kelompok mana yang layak ACC dan mana kelompok yang belum layak ACC.

Dalam MPP ini UPK menyiapkan dokumen pergiliran bagi kelompok yang sudah lunas, dokumen tersebut meliputi perjanjian kredit, kartu angsuran, kwitansi penyerahan dll. Dalam MPP ini akan dibahas tentang hasil tentang musyawarah akhir. Untuk kelompok yang belum legkap dalam administrasi akan dilakukan pendampingan tersebut.

Hasil keputusan dalam MPP ini akan menentukan mana kelompok yang layak ACC dan kelompok yang belum layak, dalam hal ini kelompok yang ACC akan bisa langsung mencairkan dana. Jika dana telah ada maka pencairan dana bisa dilakukan setelah MPP dilaksanakan.

Pencairan dana langsung 100% hal ini tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam (Petunjuk Teknis Operasional) program SPP, jika dana sudah cair maka ketua kelompok akan membagi dana tersebut sesuai dengan kesepakatan. Tentunya ada tanda bukti penerimaan dana berupa kuitansi.

Dalam hal pemanfaatan dana, anggota kelompok menggunakan dana tersebut untuk tambahan permodalan dari usaha mereka, beberapa dari mereka akan membagi lagi dana yang mereka dapatkan untuk tetangga atau saudara mereka yang juga memiliki usaha tetapi tidak dapat meminjam dana SPP karena mereka tidak masuk anggota kelompok, tetapi ada juga yang memakai sendiri dana tersebut, hal ini tentunya sesuai dengan tujuan SPP yaitu mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Tahap pembayaran angsuran, pada tahap ini angsuran dibayarkan oleh kelompok SPP Ar-rosyidah setiap tanggal 5 awal bulan, anggota akan melakukan pembayaran pada ketua kelompok. Ketua kelompok akan memberikan informasi pada

anggota jika sudah masuk waktu pembayaran, proses pembayaran dalam kelompok ini kurang berjalan dengan baik, karena masih ada anggota kelompok yang telat dalam pembayaran angsuran, tetapi biasanya ketua akan mengembalikan uang dari kas untuk pembayaran angsuran tersebut.

Pembayaran angsuran dalam kelompok ini adalah 12 kali dengan ,dengan jumlah uanh pinjaman ditambah uang jasa 1,5 persen. Untuk pembayaran yang tepat waktu akan mendapatkan IPTW (Intensive pengembalian tepat waktu). Dana tersebut diberikan untuk kelompok yang membayar tepat waktu, besar IPTW adalah 10 persen dari uang jasa.

Penilaian adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mendeskripsikan dan menyajikan data untuk pengambilan keputusan. Dalam setiap program sangat penting adanya suatu proses evaluasi, evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberlangsungan program dan pencapaian tujuan dari program. Menurut Soehanadji dan Susilo (2015:153) secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal, salah satunya adalah self-evaluation yakni bahwa pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri. Proses evaluasi dalam program ini hanya dilakukan dalam kelompok saja, jadi sistem evaluasi hanya dilakukan didalam kelompok sendiri, evaluasi dari UPK dilakukan ketika ada penunggakan pembayaran. Proses evaluasi jarang sekali dilakukan karena dalam kelompok sendiri belum ada proses evaluasi yang terstruktur. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

2) Dampak PNPM-MP Program Simpan Pinjam Perempuan Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan anggota kelompok SPP Ar-rosyidah, seperti mampu mengelola dana pinjaman dengan baik, adanya peningkatan pendapatan pada keluarga, mampu mengembangkan usaha, serta mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sunarti (2006:20-13) berpendapat bahwa kesejahteraan keluarga dibagi menjadi 2 macam, yaitu kesejahteraan ekonomi yang diukur dari pemenuhan input keluarga, misalnya diukur dari pendapatan, upah, aset dan pengeluaran keluarga. Serta kesejahteraan material yang diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga, sedangkan Soetjipto berpendapat bahwa kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan-hambatan yang serius di dalam lingkungan keluarga, dan dalam menghadapi masalah masalah keluarga akan mudah untuk diatasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga

standart kehidupan keluarga akan terwujud. Dari teori diatas akan kita padukan dengan dampak program SPP, maka akan muncul indikator kesejahteraan keluarga antara lain mampu mengelola dana pinjaman, mampu meningkatkan pendapatan keluarga, mampu mengembangkan usaha, dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari tinjauan mampu mengelola dana pinjaman, beberapa dari anggota kelompok SPP, menggunakan dana yang didapat dari SPP untuk menambah permodalan dalam usaha mereka. Dalam petunjuk teknis operasional dijelaskan bahwa dana SPP digulirkan untuk memberikan permodalan bagi kelompok yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Disini dana yang telah didapatkan untuk menambah permodalan usaha yang dijalankan atau dimiliki oleh anggota SPP.

Sistem pengelolaan dana yang didapatkan dari SPP tidak digunakan sendiri oleh anggota, ada beberapa anggota yang meminjam untuk dipakai sendiri, untuk menambah permodalan usaha yang mereka jalankan, tetapi ada juga yang setelah mendapatkan dana di bagi lagi ke orang lain yang juga mempunyai usaha, tetapi tidak tergabung dalam kelompok SPP. Karena mereka tidak ikut kegiatan rutin yang dijalankan oleh anggota kelompok SPP, seperti tahlil dan istigotsah, hal ini menyebabkan mereka tidak bisa langsung meminjam dana SPP, tetapi mereka masih bisa meminjam dengan ikut meminjam dana, dengan cara bergabung dengan anggota SPP. Mereka yang tidak dipakai sendiri, akan membagi dengan kerabat atau tetangga mereka yang juga ikut meminjam dana SPP, dengan jumlah 50 banding 50, ada juga yang 70 banding 30.

Masalah permodalan memang menjadi masalah pada usaha yang di jalankan oleh para anggota kelompok SPP, terkadang pesanan barang yang banyak membuat mereka tidak bisa melayani pesanan atau permintaan barang dagangan mereka, namun dengan adanya dana pinjaman dari SPP, dan pengelolaan dana yang baik membuat usaha mereka semakin maju dan pengelolaan sesuai dengan tujuan SPP. Permodalan semakin membaik. Usaha yang mereka jalankan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Anggota SPP sangat disiplin dalam menggunakan dana pinjaman SPP. ini dikarenakan mayoritas penerima dana SPP menggunakan dana tersebut ke dalam sektor produktif yaitu untuk menambah permodalann dalam usaha mereka sehingga juga berpengaruh terhadap pendapatan mereka.

Menurut Rozalinda (dalam Sujarwati 2013:16) perempuan memberikan kontribusi secara ekonomi bagi keluarga manakala penghasilan suami tidak mencukupi atau bahkan bila suami tidak bekerja. Hal ini nampak terlihat dalam kehidupan Anggota SPP, disini anggota SPP mempunyai kemauan besar untuk meningkatkan pendapatan keluarga, hal ini didasarkan karena berbagai alasan seperti keadaan

perekonimian yang tidak menentu, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, karena pendapatan yang didapatkan dirasa kurang atau bahkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kebutuhan yang setiap hari terus meningkat, untuk itu dibutuhkan pula materi yang cukup. Dan agar tida terganggunya stabilitas perekonomian keluarga, maka peran perempuan untuk dapat membantu perekonomian keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga sangatlah penting.

Upaya yang dilakukan oleh anggota SPP ini untuk meningkatkan pendapatan dalam keluarga adalah dengan memperbesar usaha yang mereka jalankan, dengan bantuan modal dari SPP, jumlah omset dari usaha yang mereka jalankan mengalami peningkatan, keuntunganpun meningkat seiring dengan jumlah penjualan yang meningkat. Hal ini senada dengan tujuan dari SPP yaitu memudahkan akses masyarakat khususnya pelaku usaha anggota SPP terhadap permodalan usaha.

Dampak dana pinjaman SPP terhadap pendapatan dapat terlihat dari jumlah omset penjualan serta keuntungan sebelum dan sesudah mendapatkan dana pinjaman SPP. Dari usaha yang dijalankan tersebut pendapatan mereka mengalami peningkatan, sebelum mendapat dana SPP penghasilan mereka dari usaha mereka sekitar 200.000 perminggu, tetapi sekarang setelah usaha mereka mendapatkan bantuan permodalan dari SPP pendapatan mereka sekitar 500.000 perminggu. Namun ada juga yang mendapatkan tambahan penghasilan tidak terlihat secara nyata, ada beberapa dari mereka merasakan peningkatan pendapatan mereka dari barang yang mereka jual, mereka tidak membeli lagi barang yang dibutuhkan, karena mereka tinggal mengambil barang yang mereka jual.

Dengan usaha yang bertambah besar, mereka tentunya akan mendapatkan pendapatan yang didapat sendiri semakin besar, perekonomian dalam keluarga tidak hanya bergantung pada suami mereka, pendapatan suami mereka yang tidak menentu, sementara kebutuhan terus bertambah, dan mereka mampu untuk membantu suami, untuk meningkatkan pendapatan dalam keluarga. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa anggota SPP mengalami peningkatan pendapatan dari usaha mereka setelah mendapatkan dana SPP.

Dampak dana pinjaman terhadap perkembangan usaha jika melihat kondisi usaha yang dijalankan oleh anggota SPP sebelum mendapat permodalan dengan sesudah mendapatkan permodalan peneliti melihat adanya perubahan. Perubahan ini terlihat dari perkembangan usaha dari anggota kelompok SPP, beberapa unit usaha ari mereka bertambah besar setelah mendapatkan modal dari dana SPP, mereka dapat meningkatkan pemasaran dan menambah barang dagangan mereka. Mereka merasakan adanya perubahan yang terjadi pada usaha mereka, pada sektor pemasaran pun

mengalami peningkatan, jika sebelumnya mereka hanya menjual barang dagangan mereka didesa mereka sendiri kini beberapa diantara mereka sudah mampu untuk memasarkan barang dagangan sampai pada desa tetangga.

Pengelolaan usaha yang baik juga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam perkembangan usaha mereka, keuletan dalam kaum perempuan dalam menjalankan usaha mereka sangat terlihat nyata, beberapa dari mereka setiap hari berkeliling menjual barang dagangan, semangat mereka juga terlihat saat mereka membuat dan menjajakan barang dagangan mereka. Hal ini menunjukkan semangat mereka dalam menjalankan usaha mereka sangatlah tinggi.

Dengan melihat perkembangan usaha yang ada tentunya hal ini akan berdampak pada jumlah penjualan atau omset dari dagangan mereka yang meningkat, walaupun terkadang-kadang sepi jumlah omset dari usaha anggota SPP ini lambat laun mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program SPP membawa perubahan pada perkembangan usaha anggota SPP.

Dengan usaha yang dimiliki oleh anggota SPP, mereka setidaknya tidak hanya mengantungkan penghasilan pada suami mereka, jika hanya mengharapkan penghasilan pada suami mereka, untuk mencukupi kebutuhan yang terus meningkat mereka merasa kurang.

Untuk itu melalui usaha yang mereka miliki mereka berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, dengan usaha yang mereka jalankan mereka dapat membantu suami mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Kebutuhan yang meliputi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari, seperti makan, pakaian . mereka masih dapat mencukupi jikan dengan penghasilan dari suami, ketika dihadapkan pada kebutuhan lainnya seperti untuk pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya seperti untuk sumbangan hajatan jika hanya mengandalkan penghasilan dari suami mereka tidak cukup, tetapi dengan adanya penghasilan tambahan dari usaha yang mereka jalankan. Tetapi terkadang juga mereka menghutang dulu pada tetangga merka untuk kemudian membayarnya dikemudian hari.

Dampak program SPP seperti yang telah dijelaskan diatas, hal ini tentunya sesuai dengan pendapat dari Riant Nugroho (2008:164), bahwa salah satu tujuan program pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan ditingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan. Keberhasilan suatu program perempuan adalah keberhasilan meningkatkan kemampuan anggota tersebut dan akhirnya bermuara pada meningkatnya ekonomi keluarga khususnya ekonomi keluarga perempuan tersebut. Selain itu, dampak program SPP tersebut juga sesuai dengan tujuan dari program PNPM-MP yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan.

Jika melihat dampak dari program SPP yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan beberapa indikator diatas, maka hal ini sesuai dengan pandangan Kartasmita (dalam Suhanadji dan Susilo 2015:154) bahwa memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbekakangan.

3) Faktor Pendukung Pelaksanaan PNPM-MP Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Dalam setiap pelaksanaan program pastinya pastinya terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung keberlangsungan dari pada program tersebut, ada beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Faktor pendukung pelaksanaan program ada yang bersifat internal dan ada juga yang bersifat eksternal, faktor pendukung internal berasal dari anggota kelompok SPP, faktor pendukung internal yang pertama adalah motivasi dan semangat kaum perempuan untuk memperoleh tambahan penghasilan dan merubah hidup mereka. Menurut Hubeis (dalam Ibi) keberhasilan program pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran wanita akan bergantung pada unsur yaitu motivasi wanita untuk memberdayakan diri, program-program tepat guna dan pemberdayaan yang memiliki nilai tambah ekonomi bagi pemberdayaan wanita dan peran aktif masyarakat.

Jika dilihat dari motivasi mereka ikut dalam Program SPP ini adalah agar mereka mendapat tambahan pendapatan dari usaha yang mereka jalankan, dengan mendapatkan tambahan modal, usaha yang mereka jalankan bertambah besar dan tentunya akan mempengaruhi omset dan juga keuntungan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh Hubeis (dalam Ibi) diatas, bahwa adanya motivasi untuk memberdayakan diri, serta program-program yang tepat guna dan pemberdayaan yang memiliki nilai tambah ekonomi bagi pemberdayaan wanita.

Keinginan mereka sangat kuat untuk mendapat tambahan penghasilan, sehingga penghasilan dalam keluarga tidak hanya bertumpu pada suami mereka, selain itu jumlah pengeluaran dalam keluarga yang semakin lama semakin meningkat juga menjadi pemicu mereka ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari usaha yang mereka jalankan.

Selain faktor pendukung internal ada juga faktor pendukung eksternal, faktor pendukung eksternal yang pertama adalah dukungan keluarga. Terutama pada suami. Mayoritas suami dari anggota SPP ini mendukung istri mereka untuk mengikuti program SPP ini, bentuk dukungan mereka terlihat ketika waktu pembayaran tiba, terkadang suami mereka yang mengantarkan uang pembayaran angsuran ke ketua kelompok. Alasan mereka dalam mendukung

istri mereka untuk mengikuti program SPP ini sangat bervariasi, salah satunya adalah supaya adanya penambahan pendapatan dan pemasukan di dalam keluarga, dan tidak mengandalkan penghasilan dari suami saja.

Hal ini senada dengan pendapat ahli, salah satunya dari Delly Maulana (2009:46) yaitu adanya keterlibatan keluarga atau suami kelompok sasaran. Adanya dukungan dari suami serta anak dari anggota SPP ini merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam program SPP ini.

Selain dukungan dari keluarga ada salah satu faktor yang mendukung adalah persyaratan yang mudah untuk dapat ikut dalam program SPP. Persyaratan untuk ikut dalam program SPP ini diantaranya adalah berdiri selama satu tahun, punya kepengurusan yang jelas, adanya pertemuan rutin dan didukung administrasi kelompok. Untuk administrasi dalam peminjaman anggota hanya cukup menyetorkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Untuk mengajukan dana pinjaman perlu proposal, proposal pun sudah disediakan oleh UPK, kelompok tinggal mengisi proposal tersebut, persyaratan tersebut dirasa sangat mudah dan ringan oleh anggota SPP, mereka merasa persyaratan tersebut berbeda dengan persyaratan ketika mereka meminjam ditempat lain.

Persyaratan yang mudah tersebut sesuai dengan pendapat Delly Maulana (2009:46), menurut Delly ada delapan strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan produktifitas perempuan, salah satunya adalah penyediaan dan peningkatan kemudahan akses terhadap modal usaha. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang mudah bagi anggota SPP untuk ikut dalam Program SPP tersebut.

Faktor pendukung eksternal yang selanjutnya adalah jumlah bunga yang ringan, besar bunga atau dalam program SPP disebut dengan uang jasa tersebut adalah 1,5 persen dari jumlah uang pinjaman, anggota SPP merasa besar uang jasa tersebut masih terjangkau. Hal ini tentunya sesuai dengan ketentuan persyaratan yaitu besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap.

Faktor pendukung eksternal yang selanjutnya adalah adanya dana pengembalian IPTW (intensif pengembalian tepat waktu). Dana IPTW adalah dana yang didapat oleh setiap kelompok yang melakukan pembayaran angsuran tepat waktu atau sebelum jatuh tempo, untuk kelompok yang mengembalikan tidak tepat waktu atau melebihi waktu yang ditentukan maka kelompok tersebut tidak akan mendapatkan dana IPTW tersebut. Besar dana tersebut adalah 10 persen dari jumlah jumlah uang jasa yang dibayarkan oleh kelompok setiap bulannya. Dahulu dana IPTW dapat cair setiap 3 bulan sekali, tetapi sekarang dana tersebut cair pada pembayaran terakhir.

Ada beberapa anggota SPP yang berpendapat bahwa dana IPTW tersebut dapat membantu pengembangan kelompok SPP, dana tersebut akan masuk ke dalam uang kas kelompok SPP, uang kas tersebut digunakan jika adanya keperluan-keperluan dalam kelompok SPP, seperti rapat kelompok, pertemuan dengan UPK, dll. Tetapi terkadang dana tersebut juga digunakan untuk membantu pengembangan kelompok jamaah tahlil yang mereka jalankan. Karena kelompok SPP yang mereka jalankan juga berawal dari kelompok jama'ah tahlil.

Hal ini tentunya sesuai dengan ketentuan akses BLM yang telah ada dalam MAD, salah satunya adalah adanya penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok, adanya dana IPTW, jika dikelola dengan baik maka akan menguatkan kelembagaan baik dalam aspek permodalan maupun kelembagaan kelompok.

Selain faktor pendukung diatas ada juga faktor pendukung yang lain, yaitu tidak adanya jaminan. Dalam SPP ini perempuan yang ingin meminjam dana tidak memakai jaminan, hal ini membuat ketertarikan tersendiri untuk perempuan yang ingin meminjam dana pada program SPP, tidak terkecuali anggota SPP Ar-rosyidah.

Tidak adanya merupakan salah satu upaya untuk mempermudah akses perempuan terhadap program SPP ini, anggota SPP bisa meminjam dana dalam SPP ini tanpa harus menjaminkan barang yang mereka miliki, hal ini tentunya lebih mempermudah kaum perempuan untuk menerima pinjaman modal dari program SPP, karena biasanya untuk bisa meminjam dana untuk permodalan mereka harus punya barang atau sesuatu yang bisa dibuat jaminan jika mereka ingin meminjam barang dana. Hal ini sesuai dengan ketentuan dasar SPP yaitu kemudahan, dengan arti masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pendanaan tanpa syarat agunan.

Faktor pendukung eksternal yang terakhir adalah jangka waktu angsuran ditentukan oleh kelompok, dalam sistem ini Jangka waktu pengembalian pinjaman ditentukan oleh kelompok sendiri dengan ketentuan minimal 4 bulan dan maksimal 18 bulan. Untuk kelompok Ar-rosyidah ini mereka mengambil 12 bulan, dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kelompok sendiri, tentunya ini mempermudah anggota SPP dalam mengembalikan pinjaman.

Berdasarkan gambaran faktor pendukung internal dan eksternal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor pendukung tersebut telah mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pendanaan SPP khususnya pengembalian dana bergulir anggota kelompok ke UPK. Faktor pendukung diatas juga mempengaruhi pencapaian tujuan dari program SPP.

- 4) Faktor penghambat Pelaksanaan PNPM-MP Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa

Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Selain faktor pendorong yang dipaparkan peneliti diatas, dalam pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Terdapat pula faktor penghambat pelaksanaan program SPP.

Faktor penghambat internal dalam pelaksanaan program SPP ini adalah tingkat pendidikan pengurus dan anggota yang rata-rata hanya lulusan Sekolah Mengengah Pertama (SMP), hal ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman program. Selain itu juga kurang adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan oleh pelaku program melalui pelatihan di bidang kelembagaan atau usaha ekonomi kecil yang lainnya.

Menurut Hubeis (dalam Ibi 2011) tentang keberhasilan pemberdayaan sumber daya wanita yakni faktor intern meliputi aspek pengetahuan (kognitif), ketrampilan/skill (psikomotorik), dan mental (afektif). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pentingnya wanita untuk mengenyam pendidikan yang diperlukan, mengasah ketrampilan yang dapat mendukungnya dalam suatu kegiatan ditengah masyarakat.

Selain faktor penghambat internal ada juga faktor eksternal, yaitu faktor penghambat yang berasal dari luar kelompok. Faktor penghambat eksternal yang pertama adalah sistem jaminan tanggung renteng. Sistem jaminan tanggung renteng disini adalah apabila ada kelompok lain satu desa yang masih mengalami penunggakan, maka kelompok lain dalam satu desa tersebut belum dapat mencairkan dana SPP. Sampai kelompok lain tersebut dapat melunasi tunggakan angsuran baru dana SPP tersebut dapat cair.

Hal ini terjadi dalam kelompok SPP Ar-rosyidah, untuk tahun ini dana SPP Yang seharusnya sudah bisa cair bulan maret ternyata belum dapata cair karena masih ada kelompok lain dalam satu desa yang masih memiliki tunggakan angsuran. Padahal banyak anggota yang memang sudah menunggu cairnya dana tersebut untuk menambah permodalan mereka.

Selain jaminan tanggung renteng faktor penghambat eksternal yang lainnya adalah sistem evaluasi yang tidak terstruktur, evaluasi sangat penting dalam suatu program , karena melalui evaluasi dapat diketahui bentuk pelaksanaan program, apakah sesuai dengan tujuan dari program tersebut atau tidak.serta untuk mengetahuikeberhaslan dalam program.

Evaluasi dalam SPP ini memang ada tetapi hanya dilakukan pada administrasinya saja, evaluasi baru dilakukan ketika ada kelompok yang mengalami penunggakan sedangkan evaluasi pemanfaatan hanya dilakukan dalam kelompok masing-masing, pada kelompok pun belum terlihat adanya sistem evaluasinya yang terstruktur. Hal ini

tentunya akan mempengaruhi pencapaian program terhadap tujuan dari program SPP ini.

Faktor penghambat eksternal yang terakhir adalah sistem pendampingan yang kurang maksimal, pendampingan hanya dilakukan pada administrasi saja, pada proses pemanfaatan dana tidak dilakukan pendampingan, dalam hal ini pendampingan tersebut dirasa kurang maksimal jika hanya pada proses adminstrasinya saja. jika pendampingan dilakukan pada semua tahapan termasuk pada pemanfaatan program, maka hal yang tujuan lebih cepat untuk diwujudkan secara maksimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan, dampak, faktor pendukung dan faktor penghambat PNPM-MP program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan PNPM-MP program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 dapat dinilai sesuai dengan ketentuan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- 2) PNPM-MP program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro berdampak pada kesejahteraan keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan dari anggota yang berjumlah 9 orang mereka mampu mengelola dana pinjaman tersebut untuk menambah permodalan usaha mereka, selain itu mereka juga mampu meningkatkan pendapatan keluarga dari usaha yang mereka jalankan, dari aspek perkembangan usaha, anggota SPP mampu mengembangkan usaha hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah barang dagangan serta meluasnya pemasaran, dan mereka juga mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena penghasilan tidak hanya dari suami mereka.
- 3) Ada beberapa hal yang menjadi faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah pinjaman dan pemanfaat, faktor faktor tersebut antara lain: Faktor internal (Motivasi, dukungan keluarga), dan faktor eksternal (persyaratan yang mudah, bunga yang ringan, adanya dana pengembalian IPTW, tanpa jaminan serta jangka waktu pengembalian ditentukan oleh kelompok).
- 4) Selain faktor pendukung ada beberapa faktor yang menghambat keberhasilan program, faktor tersebut antara lain: Faktor internal (tingkat pendidikan yang rendah,) dan faktoir eksternal (sistem jaminan tanggung renteng, evaluasi yang tidak terstruktur, kurangnya proses pendampingan)

Saran dalam penelitian ini adalah:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Bojonegoro dilaksanakan sesuai petunjuk teknis operasional, untuk itu kedepannya para

pelaku program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro diharapkan tetap mempertahankan pelaksanaan kegiatan ini dengan baik, melakukannya sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO), selain itu proses verifikasi diharapkan lebih bisa masuk kelengkapan langsung sehingga pemanfaat program sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

- 2) Melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan juga pembinaan, seperti pelatihan kewirausahaan agar sasaran dari program SPP ini dapat meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan mereka dalam meningkatkan usaha yang mereka jalankan.
- 3) Untuk lebih menunjang keberhasilan program ini disarankan untuk melakukan evaluasi secara periodik guna melihat pelaksanaan program yang berjalan serta sejauh mana pencapaian program terhadap tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Sistem jaminan tanggung renteng yang menjadi jaminan dalam program SPP ini, harus diperbaiki dan juga dipertimbangkan. Selain itu tidak hanya sistem ini yang diperbaiki, pendampingan terhadap pengelolaan dan pengembalian harus terus dilakukan secara berkala, agar tunggakan pembayaran dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA.

- Rahman, Aminur. 2013. *Womens Empowerment : Concept and Beyond. Global Journal Of Human Social Science - Sosiologi And Culture*. Vol 13 Issue 6 Version 0.1 year 2013 (Online), Global Journals.Org (diakses pada 28 april 2015 pukul 11:44)
- Delly Maulana. 2009. *Efektifitas Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kondisi Kaum Perempuan Miskin (Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon)*. Skripsi. Ilmu Administrasi Negara. Fisipol .UGM)
- Gumelar -Linda.2011. "Ini Pentingnya Wanita dalam Pembangunan". Dalam Okezone.Com,02 April 2015(diakses pada tgl 02 april 2015 pukul 15.00)
- Ibi, Yohanes Hurini. 2014. *Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Lewolema (Studi Kasus Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Sinar Hading dan Desa Balukhering)*. Jurnal Adminstrasi Publik dan Birokrasi . (Online), Vol 1. No 1 (www.portalaruda.org di akses pada 03/04/2015).
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Purwoeko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Riant, Nugroho . 2008. *Gender dan Strategi Pengarus Utamaanya Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Riyanto, Yatim. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Unesa Press
- Soetjipto, 1992. *Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*. Semarang: Satya Wacana
- Sudjana. 2004. *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Nonformal dan Penganngan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production
- Sugiyono. 2009 . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2010.. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi .2014 . *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT.Rafika Aditama.
- Suhanadi dan Susilo, Heryanto. 2015. *Pembangunan Masyarakat*. Surabaya : Unesa University Press
- Sunarti, Euis. 2006 . *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor
- Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM Mandiri Pedesaan. 2009. *Penjelasan (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri